


Ivan Andimuhtarom
redaksi@solopos.co.id

SUKOHARJO—Pedagang Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo mewujudkan rencana mereka melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran, Kamis (16/1). Mereka menuntut Pemkab menyelesaikan pembangunan pasar itu tahun ini.

Dalam aksi itu, mereka bahkan sempat mendesak Pemkab membuat pernyataan tertulis bahwa pembangunan pasar itu akan diselesaikan tahun ini. Namun pembicaraan antara kedua pihak tak menemui kata sepakat.

Berdasarkan pantauan *Espos*,



<http://goo.gl/BHO9se>

aksi dimulai dari depan bangunan Pasar Ir. Soekarno yang *mangkrak*. Sejak pukul 07.30 WIB, pedagang sudah berkumpul di lokasi pasar darurat di depan bangunan pasar tersebut. Seluruh pedagang yang menempati kios dan los di pasar darurat tak berjualan sejak pagi. Hanya ada beberapa penjual bunga yang tetap berjualan di trotoar dekat jalan masuk pasar darurat.

Massa yang dikoordinasi Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo (HPPKS) itu membawa bermacam spanduk dan poster bertuliskan keluhan pedagang dan tuntutan penyelesaian pembangunan pasar.

Bersambung ke Hal. 2 Kol. 4

Demo, Pedagang Ngotot Pasar Harus Selesai 2014

“ Kami mohon bantuan doa, itu tanggung jawab bersama. [Jika] Dalam pemeriksaan BPK ada yang salah, biar hukum yang bertindak.”

Demo, Pedagang Sambungan dari Hal. 1

Beberapa tulisan tersebut antara lain “Jangan Kong Kalikong, Pedagang Bukan Kingkong”, “Jangan Salahkan Jika Kami Melawan,” dan “Pasar Jadi Bupati Ganti”.

Selain pedagang, aksi itu juga diikuti beberapa kelompok mahasiswa seperti Liga Mahasiswa Nasionalis Demokratik (LMND), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beberapa universitas di Sukoharjo.

Ketua HPPKS, Fajar Purwanto, saat dimintai keterangan wartawan di sela-sela aksi, mengatakan aksi besar-besaran itu merupakan puncak kekesalan sekaligus keprihatinan pedagang karena sudah dua tahun terpaksa berjualan di pasar darurat. Sementara pembangunan Pasar Ir. Soekarno tak kunjung ada kepastian kapan akan selesai. “Ini merupakan aksi kami yang keempat,” ujar Fajar.

Pedagang dan peserta aksi lantas melakukan *longmarch* menuju Kantor Pemkab Sukoharjo. Di sepanjang jalan, perwakilan kelompok mahasiswa dan pedagang silih berganti melakukan orasi menuntut Pemkab segera menyelesaikan pembangunan pasar yang dulu bernama Pasar Kota Sukoharjo itu.

Langkah pedagang sempat terhambat karena di Pendapa Graha Satya Praja kompleks Kantor Pemkab tengah berlangsung pengajian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Massa memperlambat perjalanan sembari menunggu bubarinya pengajian.

Sekitar pukul 12.00 WIB, ketika pengajian selesai, para pengunjung rasa merapat ke gerbang depan kantor pemkab. Fajar Purwanto kembali melakukan orasi. Ia menuntut Pemkab Sukoharjo menepati janji. Berdasarkan sosialisasi saat proyek akan dimulai, kata dia, dana senilai Rp24,8 miliar cukup sampai pembangunan pasar selesai. “Nyatanya dana itu hanya membangun sampai 80 persen,” ujarnya.

Wakil Bupati Sukoharjo, Haryanto, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Agus Santosa, dan beberapa pejabat lainnya akhirnya menemui pendemo. Sementara Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya menurut informasi sedang di Semarang dalam rangka tugas dinas.

Haryanto mengatakan Pemkab sudah mengambil langkah maksimal untuk menyelesaikan pembangunan pasar. Namun, ia mengakui Pemkab harus menunggu laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menentukan langkah lebih lanjut.

“Kami mohon bantuan doa, itu tanggung jawab bersama. [Jika] Dalam pemeriksaan BPK ada yang salah, biar hukum yang bertindak. Kalau yang salah Pemkab, akan menghadapi hukum. Kalau yang salah pelaksana, juga bisa. Mohon dimengerti,” ungkap dia kepada para pedagang yang duduk di aspal halaman kantor pemkab.

Aktivis LMND, Sumarjono, kemudian meminta Pemkab memberi janji tertulis bahwa pembangunan pasar akan selesai 2014. Haryanto menyanggupinya. Mereka kemudian berembuk di ruang kerja Wabup.

Beberapa saat kemudian, Fajar Purwanto dan beberapa perwakilan pedagang keluar dan menyatakan mereka tidak menyetujui perjanjian dengan Wabup. Alasannya, pada Pasal 2 perjanjian itu, Pemkab menyatakan jika ada pihak yang tidak menerima/menghambat penyelesaian pasar, semua mekanisme akan dikembalikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Wabup, saat ditemui wartawan seusa aksi, mengatakan sebagai instansi pemerintah, pihaknya tidak dapat bertindak seenaknya. Semua hal harus sesuai mekanisme dalam undang-undang.

“Kalau pedagang tidak dapat menerima, ya sudah. Saya akan laporkan kepada pembuat kebijakan, yaitu Bupati,” pungkask dia.